

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah yang banyak ditemui di negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga mengalami permasalahan kemiskinan ini. Seseorang dikatakan miskin ketika orang tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial.²

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang paling mendasar menjadi fokus pemerintah semua negara atau daerah. Hal ini disebabkan karena kondisi kemiskinan di suatu negara atau daerah merupakan salah satu cerminan tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin banyak penduduk miskin di suatu wilayah maka semakin tidak sejahtera wilayah tersebut, sebaliknya semakin sedikit jumlah dan persentase penduduk miskinnya maka hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan penduduknya.³

Menurut Bappenas, mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu melangsungkan hidupnya yang mencapai taraf yang dianggap manusiawi. Secara

² N. I. Febianto and N. Palasara, "Analisa Clustering K-Means Pada Data Informasi Kemiskinan Di Jawa Barat Tahun 2018," *Jurnal. Sisfokom (Sistem Inf. dan Komputer)*, vol. 8, no. 2, hal 130, 2019, doi: 10.32736/sisfokom.v8i2.653.

³ Teddy Christianto Leasiwal, "Determinan Dan Karakteristik Kemiskinan Di Provinsi Maluku", *Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi*, Vol. VII, No. 2, 2013, hal 169-303

garis besar pengertian kemiskinan dapat dilihat melalui dua aspek, yaitu aspek primer, berupa aset (properti) miskin, organisasi sosial politik, keahlian dan keterampilan. Aspek sekunder berupa buruknya jaringan sosial, sumber daya keuangan dan informasi.⁴ Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan intervensi di tingkat nasional dan daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota yang lebih spesifik. Artinya kebijakan pengentasan kemiskinan saat ini tidak lagi seragam tetapi perlu memperhatikan kondisi masing-masing dimensi yang menyebabkan kemiskinan di suatu daerah. Dengan sumber daya yang terbatas, penyelesaian dimensi kemiskinan perlu fokus dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.⁵

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi jumlah kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional sendiri adalah salah satu upaya yang bertujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan Pembangunan nasional telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relative mempunyai tingkat kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena

⁴ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hal. 299

⁵ unky Sumandi, *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi*, (Jakarta: Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementrian PPn/Bappnas, 2018), hal. 1-2

itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin.⁶

Ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, sehingga banyak penduduk yang meskipun tidak tergolong miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Ketiga, sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.⁷

Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktifitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah.⁸

⁶ Nadia Ika Purnama, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara, 2017, 62–70 . *Jurnal ekonomikawan*. Vol. 17, No. 1 , 2017, hal. 62.

⁷ Ali Khomsan, dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hal. 6.

⁸ *Ibid.*, Hal 62

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Tahun 2016-2023

Tahun	Jumlah
2016	178,18 Jiwa
2017	180,13 Jiwa
2018	171,76 Jiwa
2019	163,85 Jiwa
2020	165,19 Jiwa
2021	201,97 Jiwa
2022	205,68 Jiwa
2023	193,78 Jiwa

Sumber : BPS Provinsi Bali

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali tahun 2016 tercatat mencapai 178,18 Jiwa kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 180,13 Jiwa. Pada tahun berikutnya 2018 jumlah penduduk miskin provinsi bali mengalami penurunan menjadi 171,76 Jiwa kemudian di tahun 2019 jumlah penduduk miskin menurun lagi yakni tercatat 163,85 jiwa kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan kembali menjadi 165,19 jiwa dan terus meningkat di tahun selanjutnya 2021 menjadi 201,97 jiwa dan terus meningkat kembali pada tahun selanjutnya 2022 dengan jumlah penduduk miskin menjadi 205,68 jiwa dan di tahun 2023 jumlahnya mengalami penurunan dengan jumlah 193,78 jiwa.

Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah Republik Indonesia yang dikenal dunia sebagai salah satu tujuan wisata yang paling banyak diminati. Pariwisata sebagai pencetak rupiah bagi Provinsi Bali menjadi pintu masuk bagi kesejahteraan penduduk. Namun, dibalik majunya industri pariwisata di pulau dewata itu, kemiskinan masih mewarnai sosial ekonomi penduduknya dapat dilihat dari data tabel 1.1 pada beberapa tahun terakhir Provinsi Bali mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin. Naiknya jumlah penduduk miskin dapat mejadi suatu

permasalahan penting yang harus ditangani oleh negara atau daerah. Banyak dampak yang disebabkan oleh kemiskinan yang ujungnya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau daerah tersebut. sehingga penanganan masalah krmiskinan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Permasalahan kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Pertama Pertumbuhan Ekonomi, Kedua Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Ketiga adalah Faktor Pengangguran. Faktor yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, Menurut Kuznet, sebagaimana dikutip oleh Tambunan⁹, pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk beratmbah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut, yang selanjutnya akan menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan

Menurut Sadono Sukirno pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat

⁹ Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 23.

meningkat.¹⁰ Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output. Pertumbuhan ekonomi mutlak harus ada, sehingga pendapatan masyarakat akan bertambah, dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang, maka perlu diketahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara maupun daerah tergantung pada sumber daya alamnya, sumber daya manusia, modal usaha, teknologi, dan sebagainya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi juga ditunjang oleh faktor non ekonomi, seperti lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik dan kelembagaan dari negara atau daerah tersebut.¹¹

¹⁰ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta:Siagian, 2010), hal. 194

¹¹ Hari Handoko, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Ngawi*, (Solo: Tesis Tidak Diterbitkan, 2012,) hal.1-2

Tabel 1.2
Persentase Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2016-2023

Tahun	PDRB
2016	6.33
2017	5.56
2018	6.31
2019	5.60
2020	-9.34
2021	-2.46
2022	4.84
2023	5.71

Sumber : BPS Provinsi Bali

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada periode 2016-2023 pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Bali mengalami fluktuasi. Tahun 2016 jumlah pertumbuhan ekonomi sebesar 6,33% , pada tahun 2017 turun menjadi 5,56%, pada tahun 2018 naik menjadi 6,31%, pada tahun 2019 turun menjadi 5,60%, dan kembali menurun pada tahun 2020 yakni menjadi -9,34% lalu berangsur-angsur naik pada tahun 2023 menjadi 5,71%. Bali memang menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik di Indonesia. Namun apabila dilihat dari tahun ke tahun, persentase pertumbuhan ekonomi di Bali mengalami penurunan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kemiskinan yaitu indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia salah satu tolok ukur pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut, karena diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat yang tinggi atau dapat

dikatakan pula bahwa jika nilai Indeks Pembangunan Manusia tinggi maka seharusnya kemiskinan rendah.¹²

Menurut Todaro, sebagaimana dikutip oleh Triariani mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.¹³

Tabel 1.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2016 sampai 2023

Tahun	IPM
2016	73,65 %
2017	74,30 %
2018	74,77 %
2019	75,38 %
2020	75,50%
2021	75,69 %
2022	76,44 %
2023	77,10 %

Sumber: diolah dari BPS Provinsi Bali

Berdasarkan tabel 1.3 Jumlah indeks pembangunan masyarakat di Provinsi Bali rata-rata dari tahun 2016 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan. Selama tiga tahun terakhir, pembangunan manusia di Provinsi Bali yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren yang menggembirakan. Kondisi itu ditunjukkan oleh angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2021 sebesar 75,69% meningkat terus setiap tahun, hingga mencapai 76,44% pada tahun

¹² M. Nasir, dkk, *Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin*, (Malang: UNBRA, 2008).

¹³ Endah Ernany Triariani, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Pengangguran , dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Berau”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 3, No. 5, 2013.

2022. Pada tahun 2023, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat kembali menjadi 77,10% . Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini mengindikasikan pembangunan sosial ekonomi berimplikasi pada peningkatan kualitas masyarakat di Provinsi Bali.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap tahunnya menyebabkan naiknya produktivitas kerja seseorang. Apabila IPM mengalami peningkatan dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan. Jika kesejahteraan meningkat tingkat kemiskinan menjadi berkurang. Keberhasilan pembangunan ekonomi juga harus didukung oleh pembangunan manusia, yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu suatu ukuran komposit yang mencerminkan tidak hanya pendapatan, tapi juga harapan hidup dan pencapaian dibidang pendidikan.¹⁴

Faktor ketiga yang mempengaruhi kemiskinan adalah pengangguran. Menurut Sukirno, bahwa salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujud, sehingga apabila tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi pendapatan dan hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai sehingga dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun senantiasa mengalami pertumbuhan.¹⁵

¹⁴ UNDP. Menuju Konsensus Baru: Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia, Indonesia Laporan Pembangunan Manusia, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, Bappenas, 2001), hal. 3.

¹⁵ Sadono Sukirno, *Ekonomi Makro Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2004), hal 29.

Pertumbuhan penduduk ini cenderung akan mengakibatkan juga pertumbuhan angkatan kerja. Angkatan Kerja yaitu jumlah penduduk yang tergolong dalam umur antara 15 tahun hingga 64 tahun yang sedang bekerja atau secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan masalah pokok dalam suatu masyarakat modern. Secara umum, pengangguran diartikan sebagai keadaan yang menunjukkan suatu sumber daya yang tidak digunakan.¹⁶

Tabel 1.4
Jumlah Pengangguran Provinsi Bali Timur Tahun 2016 sampai 2023

Tahun	Jumlah Pengangguran
2016	46.484 Jiwa
2017	36.143 Jiwa
2018	35.811 Jiwa
2019	39.288 Jiwa
2020	144.500 Jiwa
2021	138.669 Jiwa
2022	131469 Jiwa
2023	72.421 Jiwa

Sumber: diolah dari BPS Provinsi Bali

Berdasarkan tabel 1.4 Jumlah pengangguran di Provinsi Bali mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2023 dimana pada tahun 2016 jumlah pengangguran sebesar 46.484 Jiwa, pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan sehingga pada tahun 2018 menjadi 35.811 Jiwa. Pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan sehingga pada tahun 2020 menjadi sebesar 144.500 Jiwa. Namun pada tahun 2021-2023 mengalami penurunan sehingga pada tahun 2023 menjadi 72.421 Jiwa.

Semakin banyak masyarakat yang tidak bekerja atau menganggur, maka semakin banyak yang akan terjebak di dalam kemiskinan. Kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada di bawah garis kemiskinan tertentu.

¹⁶ Hasyim, Ekonomi Makro, (Depok:Kencana, 2017), hal. 198.

Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak.¹⁷

Berbagai strategi pembangunan ekonomi dilakukan oleh pemerintah untuk berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan yaitu dengan mewujudkan melalui upaya menurunkan jumlah penduduk miskin, namun dalam realitasnya masih terdapat diskrepansi antara harapan dan kenyataan di lapangan berupa kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai oleh keterbatasan, ketidakmampuan, dan kekurangan. Masyarakat miskin sering menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses yang menyebar diseluruh wilayah baik di pedesaan maupun daerah perkotaan.

Tujuan dari teori mengenai proses pembangunan yang khusus diperuntukan bagi negara yang menghadapi masalah kelebihan tenaga kerja. Di banyak Negara berkembang terdapat tenaga kerja yang berlebih, akan tetapi sebaliknya menghadapi masalah kekurangan modal dan keluasan tanah yang belum digunakan sangat terbatas.

Pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Standar hidup yang rendah dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, bekal pendidikan yang minim, atau bahkan tidak ada sama sekali, angka kematian bayi

¹⁷ Khomsan, Indikator Kemiskinan,(Jakarta:Fakulta Ekologi Manuia IPB, 2015), hal. 2

yang tinggi, usia harapan hidup yang relative sangat singkat dan peluang mendapatkan kerja yang rendah.

Pertumbuhan ekonomi di Bali sempat mengalami penurunan akibat dari COVID-19 pada tahun 2020 menjadi -9.34% dan pada tahun 2021 menjadi -2.46% , maka dari itu diperlukan adanya penanganan supaya pertumbuhan ekonomi di Bali kembali meningkat untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Bali.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti masalah ini dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka langkah selanjutnya yaitu perlu adanya identifikasi masalah. Dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan yang semakin menurun dapat menghambat pembangunan di suatu daerah dan mengganggu tingkat kesejahteraan masyarakat.
2. IPM mengalami peningkatan yang dapat diduga tingkat kesejahteraan juga mengalami peningkatan, kesejahteraan meningkat dan tingkat kemiskinan menjadi berkurang.
3. Banyaknya jumlah pengangguran menyebabkan tingginya kemiskinan.
4. Kemiskinan menyebabkan kelesuan ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali ?
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali ?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali?
4. Apakah Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh secara bersama-sama Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali
2. Untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali.
3. Untuk menguji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali.
4. Untuk menguji pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan hasil akhirnya dapat dimanfaatkan sebagai pembangunan ilmu dan sumbangsih pemikiran terhadap kajian ilmu di bidang Ekonomi Makro dan Ekonomi Pembangunan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga : sebagai sumbangsih pemikiran untuk pengambilan kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan oleh Pemerintah Provinsi Bali.
- b. Bagi Akademik : dapat menjadi referensi atau tambahan literasi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- c. Untuk penelitian selanjutnya : sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam kajian yang sama dengan variabel yang berbeda.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Masalah

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan yang memudahkan untuk dilaksanakannya suatu penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu sebuah objek. Cakupan dan batasan pertanyaan yang diberikan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari pembahasan yang luas dari tema penelitian ini. Dalam penelitian ini variabel-variabel yang dikaji dan diteliti berfokus pada variabel bebas (X) dan variabel

terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_2), dan Pengangguran (X_3), sedangkan variabel terikat (Y) adalah Tingkat Kemiskinan.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian meliputi terbatasnya waktu, dana, dan tenaga yang digunakan untuk melakukan penelitian. Selain itu juga terbatasnya variabel makro ekonomi yang menjadi indikator yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Oleh karenanya, dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pengangguran yang berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali Pada Tahun 2016-2023.

G. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini perlu adanya penegasan istilah dari judul yang diangkat agar tidak terjadi perbedaan pemahaman. Oleh karena itu penulis memberikan penegasan istilah mengenai judul tersebut sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk domestik bruto atau pendapatan manusia. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh dan berkembang apabila terjadi pertumbuhan output.¹⁸

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu angka yang mengukur pencapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang.¹⁹

c. Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan.²⁰ Jadi seorang yang tidak bekerja, tetapi tidak aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur.

d. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan harta dan benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang yang hidup dalam lingkungan serba miskin atau kekurangan modal.²¹

¹⁸ Pradnya Paramitha Hapsari dan Abdul Hakim, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Studi Pemerintah Kota Batu" *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019

¹⁹ Saputra, W.A, *Pengelolaan Administrasi Penduduk Desa*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal. 77

²⁰ Sudono Sukirno, *Makro Ekonomi Moderen*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2000). hal. 35

²¹ Rezki Mardiatillah dan Maya Panorama, "Pengaruh Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2015-2019" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.18 No 2 Tahun 2021

2. Penegasan Operasional

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti atau memberikan suatu operasional yang diperlukan dalam mengukur suatu variabel.²² Maka berikut definisi operasional variabel-variabel yang digunakan.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi secara nominal dapat digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

b. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia dalam penelitian ini diperoleh dari laporan yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Bali tahun 2016-2023. Indeks pembangunan manusia (IPM) dapat diukur melalui perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, dan pendidikan.

c. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Garis kemiskinan yang merupakan dasar perhitungan jumlah penduduk miskin ditentukan dua kriteria yaitu pengeluaran konsumsi perkapita per bulan yang setara

²² Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal 152.

dengan 2100 kalori perkapita per hari dan nilai kebutuhan minimum komoditi bukan makanan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang disajikan guna menjelaskan dalam penelitian ini antara lain :

BAB I PENDAHULUAN. Bagian ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan masalah, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI. Bagian ini meliputi landasan teori, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN. Bagian ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel, sumber data, variabel, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN. Bagian ini meliputi deskripsi data dan pengujian data.

BAB V PEMBAHASAN. Bagian ini meliputi penjelasan tentang temuan-temuan yang dikemukakan pada hasil penelitian

BAB VI PENUTUP. Bagian ini meliputi kesimpulan dan saran